



[Date]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP TAHUN 2024

lkip 2024 diSDUKCAPIL kota BOGOR
[COMPANY NAME]

LKIP 2024 DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi LKIP ini menginformasikan capaian kinerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam tahun 2024, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2024, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat memberikan informasi, Gambaran yang akurat, relevan dan transparan kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Akhir kata kami berharap agar LKIP Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bogor, Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BOGOR,

GANJAR GUNAWAN.A.P
Pembina Utama
NIP. 19750715 1993111002

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum	3
	1.4 Cascading dan Pohon Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	5
	1.5 Gambaran Umum dan Organisasi	5
	A Kedudukan	5
	B Tugas Pokok dan Fungsi	6
	C Susunan Organisasi	6
	1.6 Data Kepegawaian	7
	1.7 Isu Strategis	9
	1.8 Anggaran Tahun 2024	9
	1.9 Tindak Lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP 2023 ..	12
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
	A Perencanaan Kinerja	15
	1 Tujuan dan Indikator Kinerja Utama	17
	2 Strategi dan Kebijakan	19
	B Perjanjian Kinerja	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	A Capaian Kinerja Organisasi	24
	B Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	42
	4.1 Kesimpulan	42
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	42
	4.3 Penghargaan Inovasi dan Predikat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024	42
	DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Cascading dan Pohon Kinerja	5
Gambar 2	Struktur Organisasi	7



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan Kinerja harus menyajikan penjelasan tentang devisi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atau kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 berupa perencanaan Kinerja dan Pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2024, juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaak program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Disdukcapil Kota Bogor pada Tahun 2024 telah mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintah, baik pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, Sistem tersebut dikenal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bogor berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu,

penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dituangkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2019-2024. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Kota Bogor adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pengelolaan Sumber daya yang ada di Disdukcapil Kota Bogor. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* yang terkait kepada instansi pemerintah.
 4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
 5. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024, berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bogor, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan Warga masyarakat Kota Bogor.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

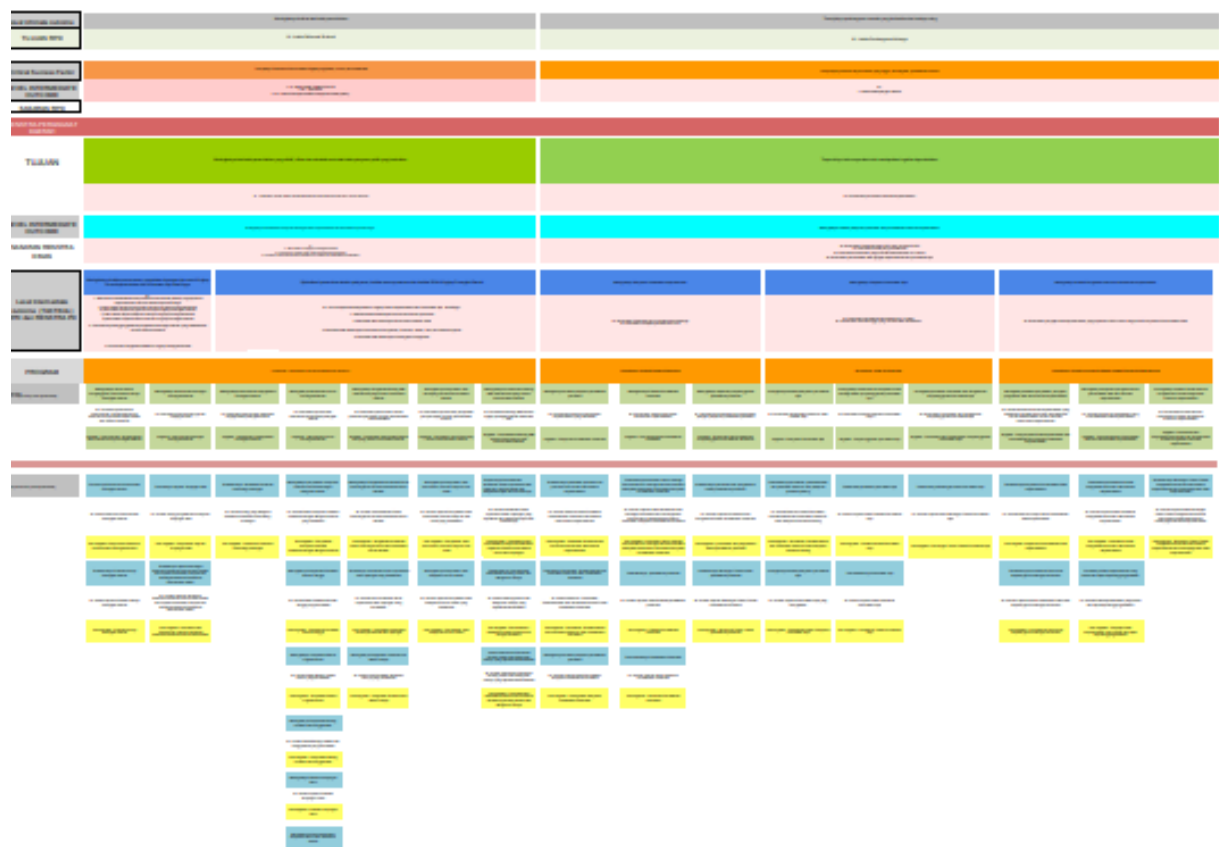
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan LKIP Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 3 Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;

1.4 CASCADING DAN POHON KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor, dimana setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk dapat memberikan konstribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.1 Cascading dan Pohon Kinerja



1.5 GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI

A. Kedudukan

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Disdukcapil Kota Bogor adalah unsur pelayanan Masyarakat di

bidang Administrasi Kependudukan untuk sub bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berkedudukan di Jalan Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) Nomor 45A Bogor Utara Kota Bogor.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan Sebagian urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kep[ependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

Kepala Disdukcapil dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Jabatan Fungsional.

- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - a. 3 (tiga) Kelompok Jabatan Analis Kebijakan;
 - b. Staf ;
- 4. Bidang Pencatatan Sipil
 - a. 3 (tiga) Kelompok Jabatan Analis Kebijakan;
 - b. Staf ;
- 5. Bidang PIAK
 - a. 3 (tiga) Kelompok Jabatan Analis Kebijakan;
 - b. Staf ;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Disdukcapil Kota Bogor



1.6 DATA KEPEGAWAIAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki 81 Pegawai, terdiri dari 47 PNS dan 1 P3K dan 33 Non ASN. Dalam menjalankan tugas Pokok dan fungsinya Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh PNS berjumlah 47 Pegawai dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S2	3
2	S1	33
3	Diploma	6
4	SMA	37
5	SMP	1
6	SD	1
	Jumlah	81

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat		2	11		13
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2	12	1	16
4	Bidang Pencatatan Sipil			9	1	10
5	Bidang PIAK		1	5	1	7
	Jumlah		5	38	4	47

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon		
		II	III	IV
1	Kepala	1		
2	Sekretariat			2
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	
4	Bidang Pencatatan Sipil		1	
5	Bidang PIAK		1	
	Jumlah	1	2	2

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Non ASN Sampai dengan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Operator Pelayanan	20
2	Kebersihan	6
3	Keamanan	5
4	Pengemudi	2

		33
--	--	----

1.6. Jumlah Pegawai Disdukcapil Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan Tahun 2024

No	Uraian	Pria	Wanita
1	Kepala	1	
2	Sekretariat	5	6
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13	3
4	Bidang Pencatatan Sipil	6	4
5	Bidang PLAK	5	2
	Jumlah	32	15

1.7 ISU STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomorn 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024-2025, dimana berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan visi dan misi kepala daerah beberapa hal yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan adalah isu-isu strategis yang merupakan dampak aktifitas Kota antara lain :

1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan adminsitrase kependudukan;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraanurusan administrasi kependudukan;
5. Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK;
6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan Pendataan Adminduk

1.8 ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.938.459.630 (Empat Belas

Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan telah mengalami perubahan Anggaran dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mendapatkan penambahan Anggaran dari Dana Insentif Fiskal, dan Bankeu dari Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Murni +Pergeseran+Dana Fiskal	Pagu +Dana Fiskal +Bankeu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.938.459.630	16.669.734.530	17.769.959.530
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.819.606.730	14.223.093.030	14.223.093.030
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	86.746.900	86.746.900	86.746.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900	86.746.900	86.746.900
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	9.588.294.582		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.532.014.582	10.952.671.326	10.952.671.326
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.280.000	50.260.000	50.260.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.807.500	666.032.500	666.032.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.499.800	17.499.800	17.499.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.469.100	30.469.100	30.469.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.593.500	244.593.500	244.593.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.612.000	21.612.000	21.612.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.184.800	79.459.800	79.459.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.448.300	272.398.300	272.398.300
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.831.700	323.392.000	323.392.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	354.831.700	323.392.000	323.392.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.516.444.848	1.595.859.104	1.595.859.104
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.412.520	288.526.776	288.526.776

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.241.032.328	1.307.332.328	1.307.332.328
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	596.481.200	548.131.200	548.131.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaaa, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	188.090.000	154.740.000	154.740.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.296.000	234.296.000	234.296.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.095.200	159.095.200	159.095.200
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.521.028.000	1.916.656.800	3.016.881.800
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	19.540.000	9.770.000	9.770.000
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.000	9.770.000	9.770.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-
2.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.501.488.000	1.906.886.800	3.007.111.800
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1.501.488.000	1.906.886.800	3.007.111.800
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	228.978.500	161.138.500	161.138.500
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	112.840.000	45.000.000	45.000.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	77.550.000	45.000.000	45.000.000
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	35.290.000	-	-
3.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	116.138.500	116.138.500	116.138.500
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	116.138.500	116.138.500	116.138.500
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	368.846.400	368.846.200	368.846.200
4.1	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	237.916.400	237.916.400	237.916.400
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	95.276.400	95.276.400	95.276.400
	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	142.640.000	142.640.000	142.640.000

4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.460.000	102.459.800	102.459.800
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat	102.460.000	102.459.800	102.459.800
4.3	Penyusunan Profil Kependudukan	28.470.000	28.470.000	28.470.000
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	28.470.000	28.470.000	28.470.000
	JUMLAH	14.938.459.630	16.669.734.530	17.769.959.530

1.9 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2023

Berikut ini merupakan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang tertuang dalam Laporah Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor 700/118-Itda tanggal 31 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO	Kelemahan Atas Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Keterangan
			S	D	B	
1	Anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada perencanaan kinerja yang akan dicapai guna mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	Menetapkan anggaran yang mengacu pada perencanaan kinerja yang akan dicapai guna mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	√			Telah menetapkan anggaran yang mengacu pada perencanaan kinerja yang akan dicapai guna mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan bukti eviden : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen RKA 3. Dokumen DPA 4. Dokumen RAK
2	Pengukuran Kinerja yang dilakukan belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan mempengaruhi	Melakukan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan mempengaruhi	√			Telah melakukan penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan mempengaruhi

	penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja melalui rencana aksi				penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja melalui rencana aksi pada : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Rencana Aksi 3. Dokumen DPA
3.	Pelaksanaan review berjenjang atas Laporan Kinerja belum menggunakan lembar kendali Reviu Laporan Kinerja	Melaksanakan reviu berjenjang atas Laporan Kinerja Menggunakan lembar kendali Teviu Laporan Kinerja	√			Telah melaksanakan reviu berjenjang atas Laporan Kinerja menggunakan lembar kendali Reviu Laporan Kinerja pada : a. Lembar Kendali Laporan Kinerja b. SKP Berjenjang
4	Kinerja Individu pada setiap pegawai belum dilaksanakan secara periodic dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	Melakukan pengukuran secara lebih insentif setiap bulannya untuk pencapaian dari Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Perjanjian Kinerja dari Eselon II,III dan IV	√			Telah melakukan pengukuran secara lebih insentif setiap bulannya untuk pencapaian dari indicator Kinerja Utama, Pencapaian Perjanjian Kinerja dari Eselon II, III, IV pada : 1. Laporan Realisasi Anggaran
5.	Telah Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang telah diformalkan,dipublikasikan, namun penyusunan dokumen kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan tepat waktu	Telah Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang telah diformalkan ,dipublikasikan, namun penyusunan	√			Telah melakukan penyusunan dokumen kinerja secara berkala dan tepat waktu pada : 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Perjanjian Kinerja

		dokumen kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan tepat waktu				3. Dokumen LKIP
6.	Dokumen Laporan Kinerja belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Laporan Kinerja	√			Telah menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada Laporan Kinerja pada : 1. Dokumen LKIP 2. Laporan Realisasi
7.	Dokumen Laporan Kinerja telah di reviu dan tetap diperlukan updating secara berkala terkait pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah	Melakukan updating secara berkala terkait pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi pada laporan kinerja	√			Telah melakukan updating secara berkala terkait pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi pada Laporan Kinerja pada : 1. Dokumen LKIP 2. Dokumen Pemetaan Jabatan
8	Pelaporan Kinerja belum termanfaatkan secara menyeluruh dan bersifat eksentif pada seluruh kegiatan dan bidang dalam pencapaian seluruh kinerjanya	Memanfaatkan secara menyeluruh dan bersifat ekstensif pada seluruh kegiatan dan bidang dalam	√			Telah memanfaatkan secara menyeluruh dan bersifat ekstensif pada seluruh kegiatan dan bidang dalam

		pencapaian seluruh kinerjanya				pencapaian seluruh kinerjanya : 1. Dokumen Realisasi 2. Dokumen LKIP
9	Hasil Evaluasi laporan Kinerja Individu pada setiap pegawai belum dilaksanakan secara periodic dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and funisment lainnya	Melakukan pengukuran secara lebih insentif setiap bulannya untuk pencapaian dari Indikator Kinerja Utama, pencapaian Perjanjian Kinerja dari Eselon II,III dan IV	√			Telah melakukan pengukuran secara lebih insentif setiap bulannya untuk pencapaian dari Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon II,III dan IV
10	Belum Menyusun dan menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Individu secara formal untuk seluruh pegawai non struktural	Memanfaatkan hasil pelaporan kinerja yang lengkap secara menyeluruh dan bersifat ekstensif pada semua kegiatan dan bidang dan saling keterkaitan	√			Telah memanfaatkan hasil pelaporan kinerja yang lengkap secara menyeluruh dan bersifat ekstensif pada semua kegiatan dan bidang dan saling keterkaitan 1. Dokumen LKIP 2. Dokumen Renja 3. Dokumen SKP
Jumlah			10	0	0	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD dan RENSTRA 2019-2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan Keputusan didepan, tentang Tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan, dalam Menyusun perencanaan kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta pemenuhan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program dan kegiatan) yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Disdukcapil Kota Bogor:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
2. Meningkatnya Landasan Legalitas Kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah yang mana misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Bogor, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada misi ke-3, yaitu : ***“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera”***, dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah :

<i>Tujuan</i>	: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
<i>Sasaran</i>	: Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga
<i>Strategi</i>	: Meningkatnya landasan legalitas dan keutuhan keluarga
<i>Arah Kebijakan</i>	: Peningkatan layanan Administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya

1. Tujuan dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi. Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Disdukcapil Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan Disdukcapil Kota Bogor yang meriupakan Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor dan terwujudnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka mendukung ketahanan keluarga. Dari tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat dihasilkan pencapaian jangka pendek 1 (satu) tahun yang berupa sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dilingkiup perangkat daerah'
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tabel 2.1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kota Bogor

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
	Sasaran ke 1 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup perangkat daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	NA	NA	80.01	81	82
	Sasaran ke 2 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudiukan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka mendukungketahanan keluarga	Persentase penduduk yang memiliki legalitas administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Presentase penduduk yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Kependiudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) agar terlihat ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Capaian IKU ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah

ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung jawab	Sumber Dana	Ket
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/ Cara Prerhitungan	Satuan			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	$\sum$ Permohonan Data Kependudukan yang dilayani/ $\sum$ Pemohon Data Kependudukan x 100%	Persen	Bidang Penyajian Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan pencata Tan Sipil	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang terlayani	$\sum$ Jumlah yang dilayani/ $\sum$ Jumlah pemohon x 100%	Persen	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan pencata Tan Sipil	

2. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan setiap misi, dirumuskan strategi untuk setiap misi yang sudah ditetapkan agar tujuan setiap misi bisa tercapai, dimana selanjutnya setiap strategi ditindaklanjuti dengan kebijakan sebagai pedoman Menyusun program. Penetapan strategi dan kebijakan disesuaikan dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor serta disesuaikan dengan tugas pokok dang Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Berikut adalah uraian strategi dan kebijakan untuk setiap misi:

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Ramah Bagi Keluarga				
Misi : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 1 :	Nilai Indeks Reformasi	1. Menyediakan sarana dan	1. Peningkatan kualitas

	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	prasarana pelayanan yang berkualitas 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	sarana dan prasarana 2. Peningkatan kapasitas SDM
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	Mengoptimalkan pelayanan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik	1. Pengembangan data kependudukan berbasis system informasi terintegrasi 2. Peningkatan kualitas database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan 3. Pemutakhiran data kependudukan secara berkala 4. Pengembangan inovasi pelayanan pemanfaatan penduduk
			Integrasi data kependudukan	Melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan SKPD Kota Bogor dan instansi terkait
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
Tujuan 2 : Terwujudnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka mendukung ketahanan keluarga		Persentase penduduk yang memiliki legalitas administrasi kependudukan		

	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang terlayani	Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan Administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil Kota Bogor dalam melakdsanakan tugasnya menunjang misi 2 dan misi 3, untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor yaitu : “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang Cerdas” dan “Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang Sejahtera” sesuai dengan 5 (lima) Program yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam Kurun 5 (lima) tahun kedepan, diantaranya

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.4. Sasaran, Program dan Kegiatan Disdukcapil Kota Bogor

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk
		Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

			Penyusunan Profil Kependudukan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Dearah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staff untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, Indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Bogor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dibuat sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja Pembangunan.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Ese:lon II, III dan IV.

Mengacu pada hal yang sudah ditetapkan tersebut, dengan mempertimbangkan prioritas Pembangunan dan arah kebijakan Pembangunan maka target kinerja utama yang diperjanjikan Disdukcapil Kota Bogor tahun 2024 adalah :

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Disdukcapil Kota Bogor

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	82	86.62
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase penduduk yang terlayani	%	100%	100%

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Berita Acara Penyesuaian Target Indikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Menyusun Kembali Perubahan Perjanjian Kinerja dengan satuan target yang sama, nilai pagu anggaran yang berbeda yaitu dalam tabel 2.6.

Tabel 2.5.

Lampiran Program Pagu Anggaran dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2024

No	Program	Anggaran		Sumber Dana
		APBD 2024	Perubahan APBD 2024	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Disdukcapil	12.819.606.730	14.223.093.030	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340.376.400	368.846.200	APBD
3	Program Pendaftaran Penduduk	1.521.028.000	3.016.881.800	APBD
4	Program Pencatatan Sipil	228.978.500	161.138.500	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	28.470.000	-	APBD
	Jumlah	14.938.459.630	17.769.959.530	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Didalam system Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Perencanaan Strategis merupakan titik awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah agar mampu membuat pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public perihal pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran.

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Bogor. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data kinerja Disdukcapil Kota Bogor dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Disdukcapil Kota Bogor. Pengumpulan Data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Disdukcapil Kota Bogor dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Pengukuran

Kinerja Disdukcapil Kota Bogor mencangkup indikator kinerja pada sasaran strategis sehingga akan terlihat tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah diterapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

Selain itu juga dilakukan perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir agar dapat dianalisis peningkatan atau penurunan kinerja setiap tahunnya sehingga bisa diantisipasi solusi yang akan diterpkan pada perencanaan kinerja dimasa mendatang. Analisa juga dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja yang telah tercapai sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Disdukcapil Kota Bogor.

3.1. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan Antara lain strategi, program, dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor 800/80 – Disdukcapil Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Dimana dalam SK tersebut tercantum bahwa terdapat 2 indikator kinerja utama Disdukcapil Kota Bogor.

Sementara untuk Sasaran Kinerja sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan Walikota Bogor terdapat 3 Sasaran.

Realisasi kinerja Disdukcapil Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Capaian IKU Disdukcapil Tahun 2024

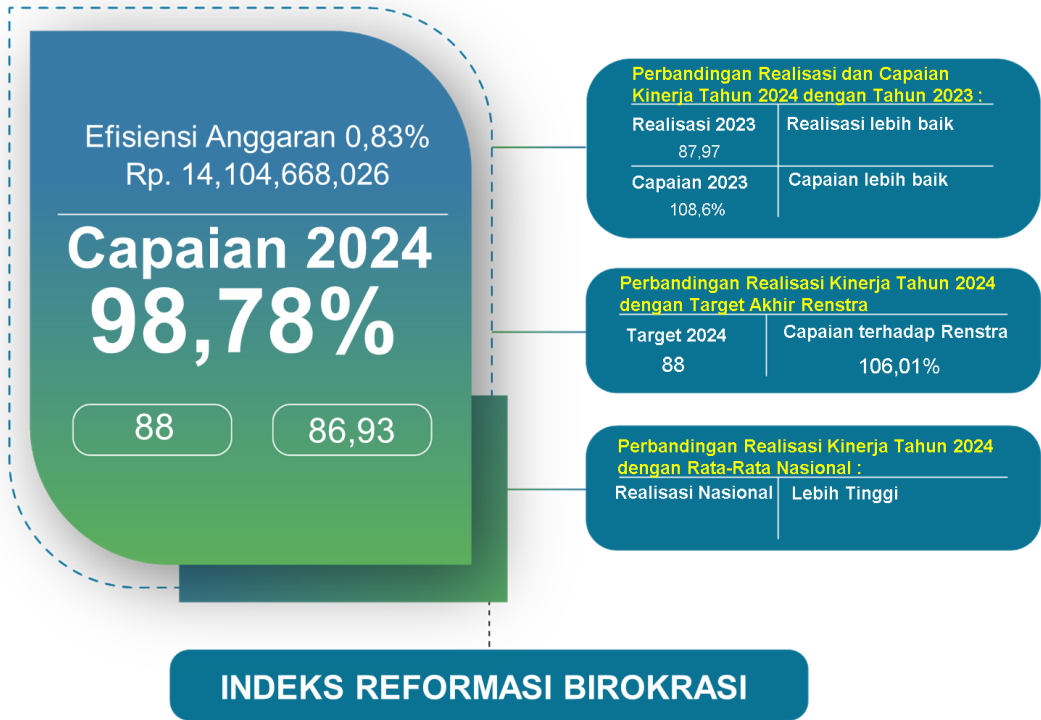
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100%	100%	100%
2	Mreningkatnya kualitas penyelenggaraan	Prosentase penduduk yang terlayani		100%	100%	100%

	administrasi kependudukan					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

Tabel 3.1.2
Realisasi Sasaran Disdukcapil Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	88	86.93	98.78%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100%	100%	100%
3	Mreningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase penduduk yang terlayani	%	100%	100%	100%

Bagan Capaian Sasaran 1



Disdukcapil Kota Bogor belum berhasil mencapai target perubahan Indeks Reformasi Birokrasi dikarenakan belum terlaksanyanya Assesment SPBE untuk Aplikasi dan juga belum dilaksanakannya pengadaan dengan metode daring.

Namun target Renstra terkait Indeks Reformasi Birokrasi telah berhasil dilampaui dengan target 82 dan realisasi 86.93 sehingga capaian 106.1%. Disdukcapil Kota Bogor juga telah berhasil meraih **Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** sehingga menambah nilai dalam Reformasi Birokrasi.

Bagan Capaian Sasaran 2



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah berhasil optimal melayani masyarakat, yang tercermin dari pencapaian Prosentase Penduduk yang Terlayani sebesar 100%. Realisasi ini di dapat dari perhitungan antara jumlah masyarakat yang memohon layanan kependudukan dibagi dengan jumlah penduduk yang dilayani dan dikali 100%.

Capaian kinerja terkait prosentase penduduk yang terlayani dibandingkan dengan tahun lalu dan juga target renstra telah sama baiknya dan telah mencapai target.

Bagan Capaian Sasaran 3



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah berhasil optimal mengelola data dan informasi kependudukan, yang tercermin dari pencapaian Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan sebesar 100%. Realisasi ini di dapat dari perhitungan antara jumlah permohonan data kependudukan yang dilayani dibagi dengan jumlah permohonan data kependudukan dan dikali 100%.

Capaian kinerja terkait prosentase pengelolaan data dan informasi kependudukan dibandingkan dengan tahun lalu dan juga target renstra telah sama baiknya dan telah mencapai target.

Tabel 3.1.3
Realisasi kinerja Program Disdukcapil Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	A	100%
		Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3.55	3.85	108.5%
2	Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	100	100	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100%
		Persentase Anak yang memiliki KIA	%	80	80	100%

3	Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang memiliki Akta Kelahiran	%	99	99	100%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	60	60	100%
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100	100	100%

Realisasi capaian dari target Indikator Kinerja Utama Disdukcapil Kota Bogor, Sebagian besar telah mencapao target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena berbagai kegiatan percepatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai pendorong capaoan keberhasilan diantaranya :

1. Terdapat layanan yang memanfaatkan perjanjian Kerjasama dengan Instansi lain guna menunjang capaian kinerja dan kepemilikan dokumen kependudukan di Masyarakat;
2. Terdapat Layanan Jemput Bola dan rekam ditempat bagi lansia, disabilitas, transgender dan sakit keras yang sangat berpengaruh terhadap capaian target perekaman KTP-el;
3. Terdapat layanan online Pakuan Prima yang sangat bermanfaat di Masyarakat karena memudahkan Masyarakat mengurus administrasi kependudukan Dimana saja dan kapan saja;
4. Terdapat layanan loket pengambilan Drive Thru Dimana memmmudahkan Masyarakat mengambil dokumen kependudukan yang telah diurus secara online karena tidak perlu parker dan turun dari kendaraannya;
5. Terdapat Layanan pengambilan dokumen melalui aplikasi gojek;
6. Terdapat layanan Disdukcapil Goes To School dimana petugas mendatangi sekolah-sekolah di kota Bogor untuk melaksanakan perekaman ditempat bagi pemula;
7. Terdapat layanan Service On Saturday (SOS) yaitu pelayanan pada hari libur pada hari sabtu dan dilakukan sebulan dua kali kegiatan;
8. Terdapat Layanan Sore malam (LSM) yaitu pelayanan perekaman pemula sekaligus aktivasi IKD di Kelurahan;

9. Terdapat layanan aktivasi IKD via *zoom meeting* sehingga masyarakat tidak perlu dating ke kantor Disdukcapil Kota Bogor;
10. Terdapat layanan Sampurasun yaitu pelayanan konsultasi dan pengaduan melalui Whatsaap;
11. Terdapat Layanan Lapis Bogor yaitu Kerjasama Disdukcapil dan Pengadilan Negeri Kota Bogor;
12. Terdapat Layanan Palu Sakti yang diadakan di kecamatan Kota Bogor, bekerjasama dengan Kejaksaan dan Wilayah kecamatan untuk memudahkan masyarakat tidakperlu lagi haris dating ke PN Kota Bogor.

Secara umum hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus segera di tindaklanjuti :

- a. Rata-rata nilai SAKIP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih perlu peningkatan dalam komponen pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
- b. Rata-rata indeks Profesionalisme ASN mencapai 81.94
- c. Budaya Inovasi di Perangkat Daerah masih perlu untuk ditingkatkan

Terwujudnya Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melaksanakan beberapa terobosan baik dengan perilaku ASN maupun pada pelaksanaan Pelayanan dengan mengadakan MOU dengan beberapa organisasi Perangkat Dearah yang ada di Kota Bogor, Yayasan, Rumah Sakit Sekolah sekolah dan beberapa Lembaga dengan sebelumnya mengajukan Surat permohonan ke Disdukcapil Kota Bogor.

3.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Lalu

Perbandingan Kinerja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024 dengan Tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sat	Realisasi		Capaian	
				2024	2023	2024	2023
1	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Dearah	Nilai	86.93	87,97	98.78%	108,6%

2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data dan informasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%

Mengacu data pada table 3.2.1 diatas terlihat bahwa semua indikator sasaran strategis telah mencapai target dan sama baiknya dengan tahun sebelumnya, hanya saja pada Indeks Reformasi birokrasi mengalami penurunan karena belum dilaksanakannya assessement spbe aplikasi dan juga belum menggunakan pengadaan system daring..

3.3. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Disdukcapil Kota Bogor terhadap target akhir jangka menengah tertuang dalam tabel 3.3.1 sebagaimana terlampir;

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangak Menegah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sat	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Dearah	Nilai	82	86.93	106.1%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data dan informasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100	100	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang terlayani	%	100	100	100%

Seluruh indicator sasaran telah melampaui target akhir jangka menengah yaitu indikator Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah, Indikator persentase penduduk yang terlayani dan indikator Persentase Pengelolaan data dan Informasi Kependudukan.

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Program	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja		
				Realisasi	Target Provinsi 2024 (blm ada data capaian)	Target Nasional 2024 (blm ada data capaian)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A		
2	Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki e-KTP	%	100		99.4%
		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	100		-
		Persentase Anak yang memiliki KIA	%	80		60%
3	Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	99		99%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	60		-
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	%	100		-

3.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Sosial

Perbandingan antara capaian 2019,2020,2021,2022,2023 dan 2024 dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.5.1

Tabel 3.5.1 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Terget 2024	Target Renstra
1	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Dearah	NA	NA	76.03	87.97	86.62	82	82
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data dan informasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mengacu pada data tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di Lingkup Perangkat Daerah Capaian Indikator pada sasaran tersebut telah melampaui target seharusnya.
2. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas perngelolaan data dan informasi kependudukan
Indikator sasaran tersebut telah mencapai 100% dan mencapai target seharusnya
3. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan
Indikator sasaran tersebut telah mencapai 100% dan mencapai target tahun berjalan.

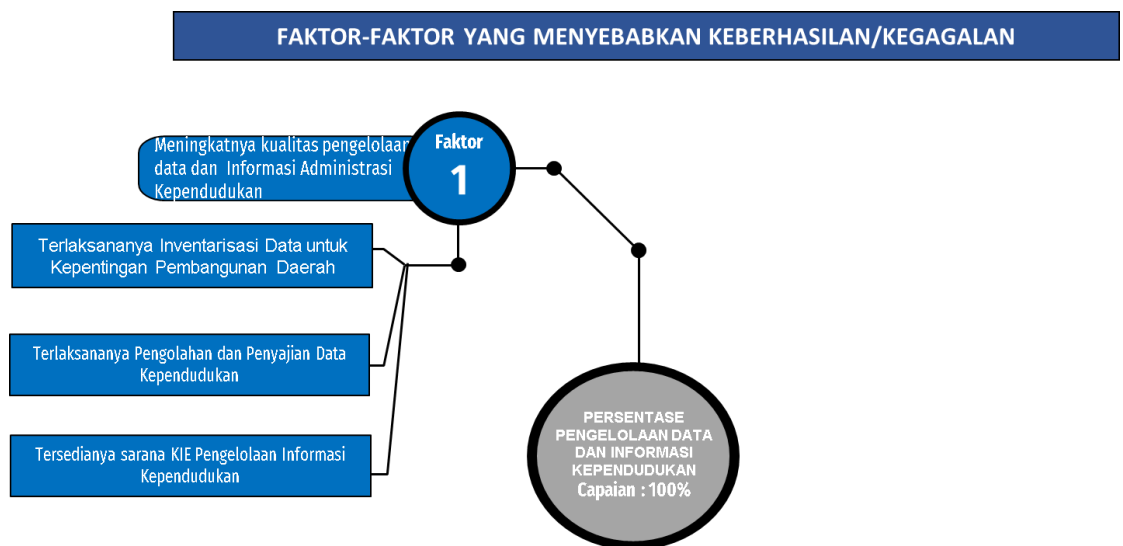
Bagan Faktor Keberhasilan Sasaran 1



Bagan Upaya Perbaikan Sasaran 1



Bagan Faktor Keberhasilan Sasaran 2



Bagan Upaya Perbaikan Sasaran 2



Bagan Faktor Keberhasilan Sasaran 3



Bagan Upaya Perbaikan Sasaran 3



3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bila melihat pencapaian target sasaran dan dibandingkan dengan efisiensi penggunaan sumber daya, akan terlihat seperti tabel 3.6.1

Tabel 3.6.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	% Target	Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Dearah	82	86.93	105.6%	99.17%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan data dan informasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data dan informasi kependudukan	100%	100%	100%	99.42%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang terlayani	100%	100%	100%	94.5%

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.345.367.181 sehingga terdapat efisiensi sebesar 97.61%

Beberapa manfaat dan kemudahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya inovasi-inovasi yang dilakukan adalah :

1. Layanan Online Pakuanm Prima, Drive Thru dan Pengambilan Gojek sangat bermanfaat dimasa pandemic karena mengurangi kerumunan dan kontak fisik.
2. Sebelum adanya layanan online Pakuan Prima pelayanan dikantor Disdukcapil penuh oleh pemohon namun setelah adanya Pakuan Prima masyarakat hanya perlu melakukan permohonan dari rumah sehingga layanan offline lebih sedikit;
3. Tersedia layanan rekam ditempat pada layanan online yang mana berlaku untuk lansia dan Disabilitas sehingga mereka tidak perlu dating ke kantor Disdukcapil namun petugas Disdukcapil yang akan datang kerumah yang bersangkutan;
4. Sebelum adanya layanan Drive Thru masyarakat harus masuk dan mengantri untuk mengambil dokumen, namun setelah adanya layanan loket Drive Thru masyarakat mengambil hasil layanan online di loket Drive Thru yang berada di pinggir jalan tanpa perlu turun dari kendaraannya;
5. Sebelumnya loket dipisah sesuai jenis layanan namun saat ini setiap loket bisa mengerjakan seluruh layanan sehingga antria merata dan tidak tertumpuk di salah satu loket layanan;

6. Loker yang bisa mengerjakan seluruh layanan membuat setiap orang bisa mendapatkan paket 3 in 1 atau 2 in 1, misalnya kepengurusan bayi baru lahir akan langsung mendapatkan KK, Akta Kelahiran dan KIA serta pindahan akian langsung mendapat KK dan KTP terbaru atau kepengurusan akta kematian akan mendapat KK baru dan akta kematian;
7. Sebelumnya loket pengambilan hanya satu arah namun saat ini loket pengambilan menjadi dua arah yaitu loket yang menghadap ruang tunggu untuk pengambilan layanan offline dan loket yang menghadap jalan untuk pengambilan layanan online;
8. Loker Drive Thru yang membuat masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan membuat membuat area parkir lebih tertata rapi;
9. Penugasan Manager on Duty setia harinya dimana yang ditugaskan adalah eselon IV membuat kendala yang terjadi di layanan dapat langsung dikonsultasikan dan diselesaikan dengan kebijakan manager on duty;
10. Pelaksanaan Layanan Sore Malam (LSM) di kelurahan untuk perekaman pemula sekaligus aktivasi IKD;
11. Pelaksanaan Layanan di tempat public seperti Mall bernama Dukcapil Family Fest (DFF);
12. Pelaksanaan aktivasi IKD melalui zoom meeting sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor disdukcapil;
13. Penerapan layanan konsultasi dan pengaduan melalui whatsapp Bernama Sampurasun untuk memudahkan masyarakat;
14. Program baru kegiatan Palu sakti yang bekerjasama Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri Kota Bogor untuk memudahkan masyarakat, sehingga tidak perlu datang ke PN untuk menggelar sidang tetap bisa dilakukan di wilayahnya masing-masing (kecamatan);
15. Upaya percepatan dan kemudahan layanan lainnya adalah :
 - a. Kerjasama dengan sekolah tingkat atas untuk perekaman bagi pemula dengan nama program Disdukcapil Goes To School membuat para pemula direkam terlebih dahulu dan nantinya KTP hanya perlu diambil atau diserahkan saat mencapai usia 17 tahun;
 - b. Kerjasama dengan Rumah Sakit, Klinik atau Bidan terkait dengan layanan 3 in 1 membuat bayi baru lahir bisa langsung mendapatkan KK, Akta Kelahiran dan KIA;
 - c. Program kado Bahagia dimana yang menikah akan diberikan kk dan KTP terbaru;
 - d. Kerjasama dengan PKK untuk menerbitkan KIA bagi PAUD, TK dan SD;
 - e. Kejasama dengan Gojek untuk pengiriman dokumen kependudukan yang diajukan melalui aplikasi Pakuan Prima.

3.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan /kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target sasaran strategis tahun 2024 tentu tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Disdukcapil juga telah menerima penghargaan Zona Integritas Wawasan Bebas dari Korupsi (WBK) yang memicu Disdukcapil untuk memberantas tuidak adanya pungutan liar segala pelayanan administrasi dilakukan secara gratis.

Berikut ini rincian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024.

Tabel 3.7.1. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Urusa/ Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi
1	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KEPENDU DUKAN DAN PENCATA TAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkupm Perangkat Daerah	A	A
			Rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan lingkup Perangkat Dearah	3.55	3.85
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	A
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat darerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	60 orang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuan gan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya peralatan kelistrikan	1 Paket	1 Paket

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan pakai habis rumah tangga	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	1 Paket	1 Paket
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan	1 Paket	1 Paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat/jamuan kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional perjalanan dinas	12 Laporan	12 Laporan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	120 Unit	120 Unit
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan tenaga administrasi perkantoran	12 Laporan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan air dan listrik	23 Unit	23 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan gedung/bangunan	1 Unit	1 Unit

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	18 Unit	18 Unit
2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E KTP	100%	100%
			Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100%	100%
			Persentase Anak yang memiliki KIA	80%	Tercapai
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	100%	100%
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksanya pemenuhan pemutakhiran data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya persentase tertib administrasi kependudukan	2 Dokumen	<i>Refocusing</i>
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	100%	100%
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya persentase tertib administrasi kependudukan	1 Laporan	1 Laporan
3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Yang memiliki Akta Kelahiran	99%	99%
			Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	60%	60%
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akte Catatan Sipil	99%	99%
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	12 Dokumen
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	<i>Refocusing</i>

		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan
4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi	100%	100%
		Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	sistem informasi administrasi kependudukan yang disediakan, disajikan diolah dan dimutakhirkan secara berkala	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen	3 Dokumen
		Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah institusi dan stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	12 Institusi	12 Institusi
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan
4		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	100%	100%
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase elemen data kependudukan yang diolah	100%	100%
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen

B. REALISASI ANGGARAN

Didalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa

pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran dimasa mendatang.

Pencapaian Sasaran tahun 2024 mengalami beberapa pergeseran dan perubahan diantaranya Refocusing, Penambahan ABT, Penambahan dana Fiscal dan disdukcapil juga mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari DKI KJakarta di akhir kegiatan bulan Desember 2024, sehingga Pagu Anggaran Tahun 2024 Rp. 14.938.459.630 mengalami kenaikan menjadi Rp. 17.769.959.530,-.

Pagu anggaran dan realisasi belanja Disdukcapil Kota Bogor setelah Perubahan Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2024

NO		PAGU	REALISASI s.d DESEMBER 2024	SISA PAGU	PERSENTASE
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.769.959.530	17.345.367.181	424.592.349	97.61
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.223.093.030	14.104.668.026	118.425.004	99.17
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900	86.310.000	436.900	99.50%
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.746.900	86.310.000	436.900	99.50%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.002.931.326	10.953.096.702	49.834.624	99.55
	Sub Kegiatan :				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.952.671.326	10.907.136.702	45.534.624	99.58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	50.260.000	45.960.000	4.300.000	91.44
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.032.500	641.521.782	24.510.718	96.32
	Sub Kegiatan :				
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.499.800	16.631.700	868.100	95.04
	Penyediaann Peralatan Rumah Tangga	30.469.100	28.209.500	2.259.600	92.58

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.593.500	226.661.500	17.932.000	92.67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.612.000	21.500.000	112.000	99.48
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.459.800	79.379.700	80.100	99.90
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.398.300	269.139.382	3.258.918	98.80
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.392.000	316.671.600	6.720.400	97.92
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	323.392.000	316.671.600	6.720.400	97.92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.595.859.104	1.570.352.533	25.506.571	98.40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.526.776	263.102.897	25.423.879	91.19
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.307.332.328	1.307.249.636	82.692	99.99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.131.200	536.715.409	11.415.791	97.92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.740.000	145.675.460	9.064.540	94.14
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.296.000	232.851.549	1.444.451	99.38
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.095.200	158.188.400	906.800	99.43
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.016.881.800	2.714.314.850	302.566.950	89.97
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.770.000	8.750.000	1.020.000	89.56
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.700	8.750.000	1.020.000	89.56
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.007.111.800	2.705.564.850	301.546.950	89.97
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.007.111.800	2.705.564.850	301.546.950	89.97

3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	161.138.500	159.524.475	1.614.025	99
	Pelayanan Pencatatan Sipil	45000.000	45.000.000	-	100
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.000.000	45.000.000	-	100
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	-	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	116.138.500	114.524.475	1.614.025	98.61
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	116.138.500	114.524.475	1.614.025	98.61
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	368.846.200	366.859.830	1.986.370	99.42
	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	237.916.400	236.047.530	1.868.870	99.21
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	95.276.400	94.276.800	999.600	98.95
	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	142.640.000	141.770.730	869.270	99.39
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.459.800	102.342.300	117.500	100
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat	102.459.800	102.342.300	117.500	99.89
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	28.470.000	28.470.000	-	100
	Penyusunan Profil Kependudukan	28.470.000	28.470.000	-	100
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	28.470.000	28.470.000	-	100
	JUMLAH	17.769.959.530	17.345.367.181	424.592.349	97.61

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan *good governance* untuk melaporkan capaian kinerja dan keuangan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. LKIP sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah karena menilai rencana kerja yang jelas dan Sistematis dengan sasaran yang terukur serta berkelanjutan, selain itu LKIP juga alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan yang diamanahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pencapaian Kinerja Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2024 pada tiga (3) sasaran strategis yng terbagi atas lima (5) Indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator melampaui target.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja Disdukcapil Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk lebih meningkatkan Kembali kinerja dan dapat mengantisipasi permasalahan permasalahan yang ada baik teknis maupun non teknis;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
3. Mempersiapkan Kembali Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang sebelumnya Disdukcapil telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dalam menerapkan reformasi birokrasi menuju Zona Integritas.

4.3. PENGHARGAAN INOVASI DAN PREDIKAT YANG DIPEROLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah banyak mendapatkan penghargaan baik dalam kota maupun tingkat provinsi

diantaranya Bogor Inovation Aeard dan Adminduk Juara yang merupakan penghargaan tingkat provinsi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor juga telah mendapatkan penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Ombusman dan PEKPP. Penghargaan yang diperoleh Disdukcapil Kota Bogor telah menunjang sasaran ke tiga yaitu pada indikator presentase penduduk yang terlayani yang dianggap pelayanan Prima.

Sebagaimana terlampir dokumentasi penghargaan yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor, sebagai berikut :

- 1 Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 (ZI- WBK) dari KEMENPAN- RI



- 2 Penghargaan Ombusman RI terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2023



		
3	Penghargaan Ombusman RI terhadap Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	
4	Penghargaan BIA	

		 A promotional poster for the ADMINDUK JUARA AWARD 2023. The title is in large, bold, blue letters. Below it, it says 'PENYERAHAN JUARA DAN EVALUASI TAHUN 2023' and '"ADMINDUK JUARA" TAHUN 2023'. The date 'Bandung, 23 Agustus 2023' is also present. The central image shows four men on a stage; one is holding a trophy and another a framed certificate. The bottom of the poster includes social media handles for 'disdukcapilkotabogor' and 'dukcapilbogor', a phone number '0812-9000-3271 (Chat Only)', and the date '23 AGUSTUS 2023'. Logos for 'BOGOR BERAKHLAK' and 'bangga medycni bangsa' are at the bottom right.
5	Bogor Inovation Award 2024 Inovasi Laksa Pedas dan Lapis Bogor	 A poster for the Bogor Innovation Award 2024. It features two men, one in a red batik and one in a red polo shirt, holding a trophy. The text 'Congratulations!' is written in a cursive font. Below that, it says 'JUARA 3' in large yellow letters, followed by 'Bogor Innovation Award 2024' and 'Kategori Perguruan Tinggi/Lembaga/Badan Usaha dengan Inovasi LAKSA PEDAS dan LAPIS BOGOR'. The prize amount 'RP. 5.000.000' is also visible. The background includes logos of various institutions and the text 'PIAGAM PENGHIA Pemert DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR'. Social media handles and a phone number are at the bottom.

DOKUMENTASI KEGIATAN DISDUKCAPIL
TAHUN 2024

1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik



disdukcapilkotabogor dan 2 lainnya

disdukcapilkotabogor • Audio asli



 6





Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapilkotabogor KELOMPOK RENTAN ADMINDUK. Dalam memberikan pelayanan prima bagi kelompok rentan Adminduk (Orang sakit, lansia dan difabel), Disdukcapil Kota Bogor melaksanakan kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP Elektronik langsung di tempat warga. Apabila ada yang membutuhkan layanan ini, silahkan menghubungi pihak kelurahan atau dapat langsung mengajukan permohonan melalui Pakuan Prima.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

2. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun



disdukcapilkotabogor dan 2 lainnya

Coldiac • Beautiful Day



 2





Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapilkotabogor LAPAK CAPIL EDISI KELURAHAN KERTAMAYA. Lapak Capil hadir di Kantor Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan pada Kamis, 10 Oktober 2024. Apa pendapat warga Kertamaya tentang layanan jemput bola pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian langsung di Kelurahan? Yuk simak tanggapannya.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berliamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

.....

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa #lapakcapil

Lihat semua komentar

11 Oktober 2024



Disukai oleh [etin_0777](#) dan lainnya

disdukcapiikotabogor LAPAK CAPIL EDISI KELURAHAN KAYUMANIS.
Lapak Capil hadir di Kantor Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal pada Jum'at, 11 Oktober 2024.

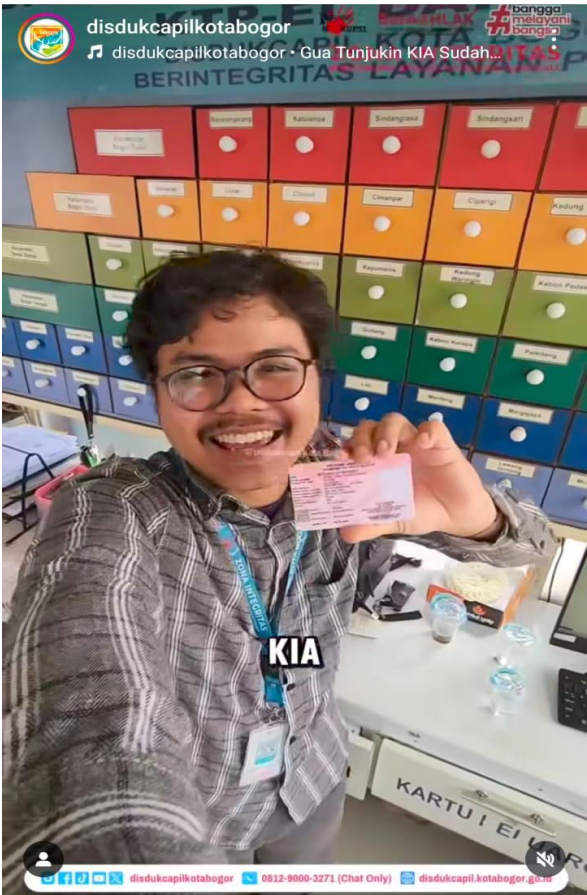
"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapiil Kota Bogor"

[@walikotabogor](#) [@heryagisantasari](#) [@sofiahsyarifah](#)
[@gandjar_445](#) [@pemkotbogor](#) [@berlihamdani](#)
[@indrichandra44](#) [@dukcapiiljabar](#) [@teguh_setyabudi](#)
[@dukcapiilkemendagri](#)

[#disdukcapiikotabogor](#) [#dukcapiilbisa](#)
[#banggamelayanibangsa](#) [#lapakcapiil](#)

14 Oktober 2024

3. Penerbitan Kartu Identitas Anak



Disukai oleh [nie_nut](#) dan lainnya

disdukcapiikotabogor Gua Tunjukin KIA Sudah Jadi 🎵
Pengajuan KIA bisa lewat online loh! Setelah status pengajuan berubah menjadi SIAP AMBIL, bisa diambil di loket Drive Thru TANPA ANTRI atau dikirim menggunakan jasa Go-Send. Mudah kan?

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapiil Kota Bogor"

[@walikotabogor](#) [@heryagisantasari](#) [@efi_hnf](#)
[@gandjar_445](#) [@pemkotbogor](#) [@berlihamdani](#)
[@indrichandra44](#) [@dukcapiiljabar](#) [@teguh_setyabudi](#)
[@dukcapiilkemendagri](#) [@bimaaryasugiarto](#)

[#disdukcapiikotabogor](#) [#dukcapiilbisa](#)
[#banggamelayanibangsa](#)

Lihat semua komentar

13 Desember 2024

4. Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Zoom Meeting




 29
 

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disuducapil kotabogor AKTIVASI IKD MAKIN ASIK DI ZOOM!
Kini, aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi warga Kota Bogor bisa dilakukan TANPA HARUS DATANG lho!
Dengan inovasi DUKCAPIL ASIK DI ZOOM, kamu bisa scan Kode QR untuk aktivasi IKD-mu lewat zoom dengan petugas Disuducapil Kota Bogor. Siapkan peralatannya dan ikuti petunjuknya. Sudah waktunya kamu punya Identitas Kependudukan Digital!

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor”

@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah
@gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi
@dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa
#banggamelayanibangsa

Lihat semua komentar

10 Oktober 2024

5. Pelaksanaan Aktivasi IKD ke Instansi di Kota Bogor




 10
 

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapilkotabogor IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL.

Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor yang telah memfasilitasi layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kota Bogor.

@bimaaryasugiarto @dedierachim @sofiahsyarifah
@gandjar_445 @pemkotbogar @berliamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi
@dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari
#banggamelayanibangsa #ikd #ktpdigital
#identitaskependudukandigital

Lihat semua komentar

6 Oktober 2023



♡ 4 ▾

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapilkotabogor AKTIVASI IKD DI KANTOR BPN KOTA BOGOR.

Pada hari Rabu, 17 Juli 2024 Disdukcapil Kota Bogor melaksanakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kantor Petanahan Kota Bogor. Kegiatan tersebut diikuti oleh karyawan dan karyawan kantor BPN Kota Bogor dengan total capaian IKD sebanyak 55 orang.

Yuk aktivasi IKD di tempat kerjamu!

Informasi lebih lanjut chat ke Sampurasun Dukcapil di
0812-9000-3271

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor"

@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah
@gandjar_445 @pemkotbogor @berliamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi
@dukcapilkemendagri @kantahkotabogor

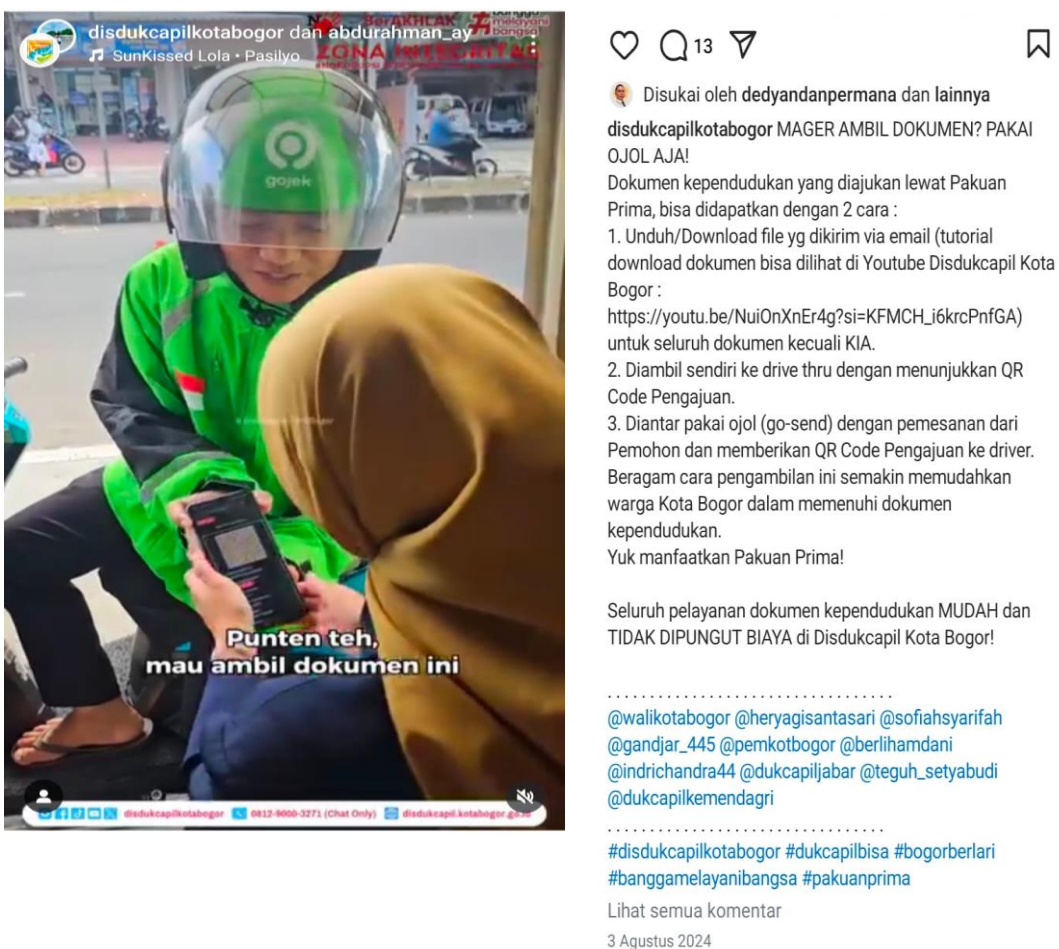
#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa
#banggamelayanibangsa #IKD #KTPdigital
#identitaskependudukandigital

Lihat semua komentar

18 Juli 2024



6. Penerapan Pengambilan Dokumen Online melalui Gojek



7. Pelaksanaan Pelayanan Di Tempat Publik Mall/Pusat Perbelanjaan (Dukcapil Family Fest)



8. Pelaksanaan Perekaman Pemula ke sekolah-sekolah (Dukcapil Goes To School)



disdukcapilkotabogor GOES TO SCHOOL : SMAN 2 KOTA BOGOR!

“Pelayanan Adminkuk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor”

@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa #dukcapilgoestoschool

16 Agustus 2024



Disukai oleh laddysa_ dan lainnya

disdukcapilkotabogor GOES TO SCHOOL : SMK PEMBANGUNANKOTA BOGOR!

“Pelayanan Adminkuk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor”

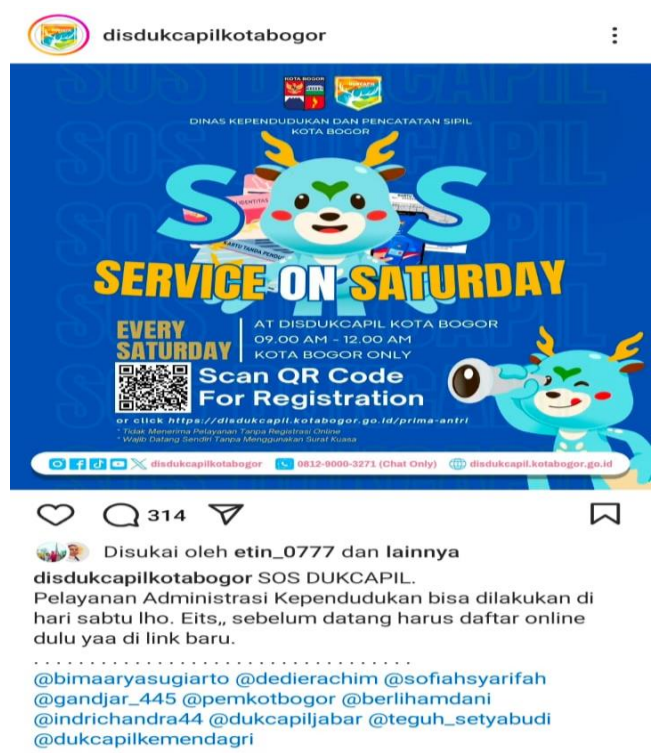
@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #banggamelayanibangsa #dukcapilgoestoschool

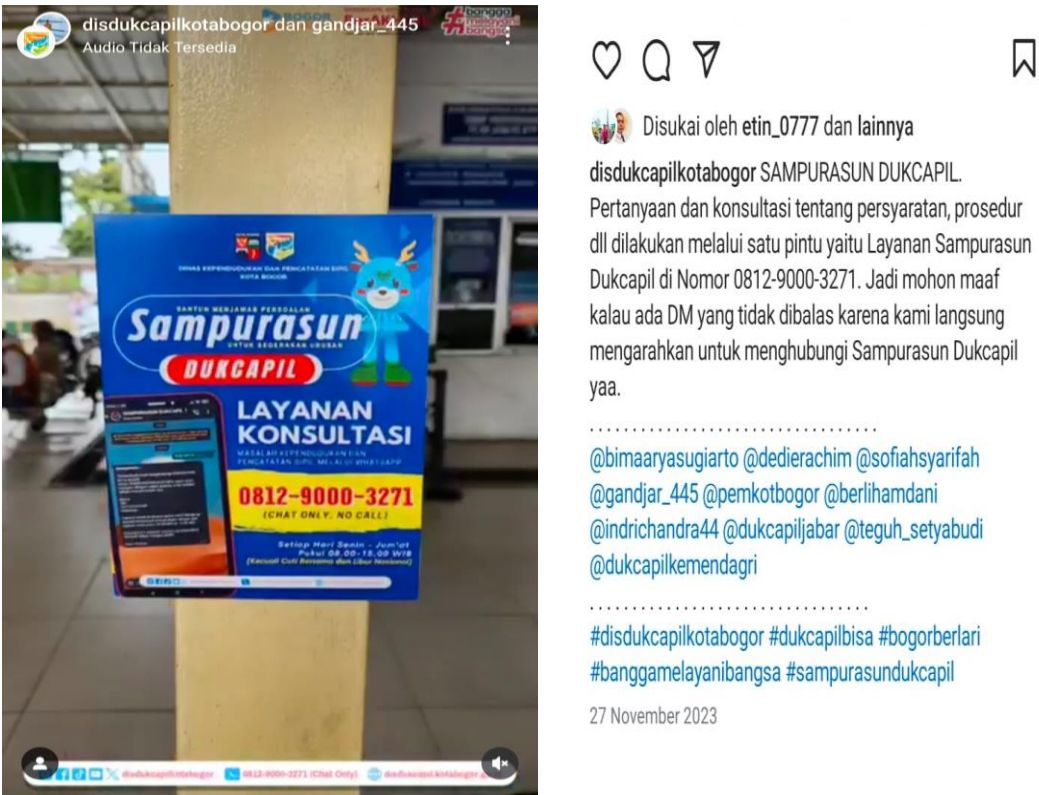
Lihat semua komentar

29 Agustus 2024

9. Pelaksanaan Pelayanan Service On Saturday (SOS)



10. Pembuatan Sarana Pengaduan melalui Whatsaap (Sampurasun Disdukcapi)





♡ Q 12

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapiikotabogor CATAT DAN SIMPAN NOMORNYA!
Sampurasun Dukcapil merupakan akronim dari Santun Menjawab Persoalan Untuk Segerakan Urusan Dukcapil. Online pertama kali pada bulan Maret 2023, Sampurasun telah menjadi kanal yang banyak diakses warga yang membutuhkan informasi dan konsultasi terkait pelayanan administrasi kependudukan. Catat dan simpan nomor Sampurasun Dukcapil : 0812-9000-3271 (Chat Only). Oia, ini khusus warga Kota Bogor yaa.

"Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapiil Kota Bogor"

.....

@walikotabogor @heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiiljabar @teguh_setyabudi @dukcapiilkemendagri

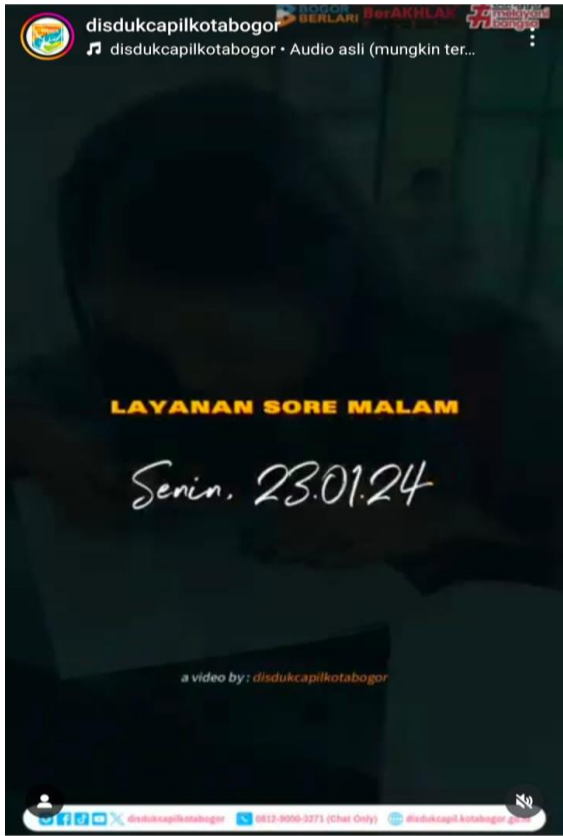
.....

#disdukcapiikotabogor #dukcapiilbisa #banggamelayanibangsa

Lihat semua komentar

2 September 2024

11. Pelaksanaan Layanan Sore Malam (LSM)



♡ Q 6

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapiikotabogor LAYANAN SORE MALAM + (LSM) DUKCAPIL
Tim LSM Dukcapil kembali melakukan jemput bola perekaman KTP Elektronik ke Kelurahan Cilendek Timur dan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat demi mengejar target perekaman KTP Pemula menyambut Pemilu 2024.

.....

@bimaaryasugiarto @dedierachim @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiiljabar @teguh_setyabudi @dukcapiilkemendagri

.....

#disdukcapiikotabogor #dukcapiilbisa #bogorberlari #banggamelayanibangsa #smdukcapil #perekamanktpemula

Lihat semua komentar

23 Januari 2024



Disukai oleh dedyandanpermana dan lainnya

disdukcapilkotabogor LSM DUKCAPIL : KELURAHAN CILUAR DAN CIBULUH.

Layanan Sore Malam (LSM) Dukcapil adalah salah satu upaya Disdukcapil Kota Bogor memberikan pelayanan perekaman KTP Elektronik yang lebih dekat bagi para pemula yang berusia mulai dari 16 tahun ke atas. Seiring dengan target perekaman bagi DP4 Pemula yang diinstruksikan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, LSM Dukcapil menjadi sebuah inovasi yang 'out of the box', efektif, mudah dan pastinya GRATIS.

.....

@bimaaryasugiarto @dedierachim @sofiahsyarifah
@gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani
@indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi
@dukcapilkemendagri

.....

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari
#banggamelayanibangsa #lsmdukcapil
#perekamanktpemula

Lihat semua komentar

6 Februari 2024

12. Perjanjian Kerjasama Layanan dengan Pengadilan Negeri Kota Bogor



disdukcapilkotabogor PALU SAKTI: Solusi Mudah Urus Dokumen Kependudukan! 📄👉

Disdukcapil Kota Bogor bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bogor menghadirkan PALU SAKTI (Pelayanan Luar Kantor Sidang Keliling Terintegrasi), sebuah inovasi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan sidang terkait dokumen kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. 🏛️📄

🎯 Tujuan:
Mendekatkan layanan kepada masyarakat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sekarang, proses pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, perubahan nama, atau dokumen lainnya menjadi lebih cepat dan mudah! 🚀

Berikut prosedur Inovasi PALU SAKTI :

1. Pengajuan : Pemohon mendaftar di link : <https://s.id/83HyE> , mengisi formulir dan memilih jenis sidang
2. Verifikasi Data : Disdukcapil memeriksa identitas dan kesesuaian dokumen kependudukan
3. Pendaftaran dan Pembayaran : Pemohon mengunggah dokumen pendukung di aplikasi e-court dan membayar biaya administrasi via e-court
4. Penjadwalan : Pemohon menerima notifikasi pengajuan dan jadwal sidang
5. Pelaksanaan : Pemohon menghadiri sidang dengan membawa data/saksi pendukung
6. Penyerahan Dokumen : Pemohon menerima dokumen kependudukan dari Disdukcapil setelah penetapan PN

🌟 Dengan PALU SAKTI, semua jadi praktis, efektif, dan efisien! Mari manfaatkan layanan ini untuk administrasi kependudukan yang lebih baik.

“Pelayanan Adminduk MUDAH dan TIDAK BERBAYAR di Disdukcapil Kota Bogor”



Disukai oleh dedyandanpermana dan lainnya
mppkotabogor Hai #MPPpeople & #TemanSmart 🙌

Pada hari Rabu 18 Desember 2024, Pelayanan Palu Sakti di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor, Pelayanan di Luar Kantor melalui Sidang Keliling Terintegrasi. Pelayanan Palu Sakti terlaksana atas kerjasama antara Disdukcapil Kota Bogor, Pengadilan Negeri Kota Bogor dan DPMPSTP Kota Bogor.

13. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra



disdukcapilkotabogor MANFAATKAN KTP DIGITAL DAN KIA.
Halo Kawan Dukcapil, Disdukcapil Kota Bogor punya Promo Special Price bagi pemilik Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP Digital di Rivera Outbound Bogor !!!

Info Promo Special Price Rivera Outbound Bogor :
Weekday : 100rb ➡ 60rb
Weekend : 115rb ➡ 70rb

Syarat & Ketentuan:
* Harga sudah termasuk tiket masuk dan tiket terusan
* Promo berlaku di s.d. 1 Februari 2025
* Promo berlaku bagi pemegang KIA atau KTP Digital (1 KIA / KTP Digital berlaku untuk maksimal 4 orang)
* Promo wajib menunjukkan KIA atau KTP Digital yang masih berlaku

Info lebih lanjut silahkan mampir ke Instagram Rivera Outbound Bogor ➡ @rivera.bogor

Info pembuatan KTP Digital dan KIA (Khusus warga Kota Bogor) silahkan WA ke Sampurasun Dukcapil di Nomor 0812-9000-3271.

Yuk...rencanakan liburan kamu hanya ke Rivera Outbound Bogor, dijamin liburan kamu pasti seru & menyenangkan

@heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445
@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44
@dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilibisa #bogorberlari
#banggamelayanibangsa

Lihat semua komentar
6 Mei 2024

disdukcapi.kotabogor
Chintya Gabriella • Nikmati Perjalanannya

LAUNCHING SIKASEP
PEMBUATAN SURAT KEHILANGAN SECARA ONLINE

LAUNCHING APLIKASI
SIKASEP
POLRESTA BOGOR KOTA

28 MEI 2024

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapi.kotabogor LAUNCHING SIKASEP. Inovasi baru dari Polresta Bogor Kota semakin memudahkan masyarakat dalam membuat laporan kehilangan dokumen penting seperti KK, KTP, Akta, dll. Melalui Sikasep, membuat surat keterangan kehilangan bisa dari mana saja, tidak perlu datang ke kantor polisi.

disdukcapi.kotabogor
Taylor Swift • Style

KICK OFF PPDB TAHUN 2024
PPDB YANG OBJEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

30 MEI 2024

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapi.kotabogor KICK OFF PPDB 2024. PJ Wali Kota Bogor, Forkompimda dan seluruh stakeholder terkait berkomitmen mewujudkan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Dukungan. Disdukcapi Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses PPDB mendukung penuh terselenggaranya PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel.

disdukcapi.kotabogor
In Paradise • Moments We Live For (Acoustic)

BSH
BOGOR

PENANDATANGANAN KERJASAMA RUMAH SAKIT BSH DAN DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

Kamis, 4 Januari 2024

Disukai oleh etin_0777 dan lainnya

disdukcapi.kotabogor PERJANJIAN KERJASAMA ADMINDUK. Mengawali Tahun 2024 dengan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 3 instansi sekaligus yaitu Rumah Sakit BSH, Puskesmas Bogor Utara dan PKBM Bakti Nusa. Penandatanganan dilakukan di Aula Rumah Sakit BSH Kota Bogor.

@bimaaryasugiarto @dedierachim @sofiahsyarifah @gandjar_445 @pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44 @dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapi.kotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari #banggamelayanibangsa #pkssadminduk #kerjasama

Lihat semua komentar

4 Januari 2024

15. Booking Antrian Online (Prima Antri)

disdukcapilkotabogor dan 2 lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BOGOR

BOOKING

ANTRIAN ONLINE

DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

PILIHAN KATEGORI LAYANAN :

Loket A : Kartu Keluarga, Akta-Akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak (KIA), Pindah Datang.

Loket B : Perekaman KTP Elektronik bagi Pemula 17 Tahun ke Atas

Loket C : Cetak Ulang KTP yang Hilang/Rusak dan KIA yang Hilang/Rusak/Perpanjangan

MULAI

2 MEI 2024

BOOKING SUDAH BISA DILAKUKAN MULAI

29 APRIL 2024

SEBELUM DATANG KE DISDUKCAPIL KOTA BOGOR

PASTIKAN ANDA SUDAH BOOKING

LINK BOOKING ONLINE : disdukcapil.kotabogor.go.id/prima-antri

[disdukcapilkotabogor](#)

0812-9000-3271 (Chat Only)

disdukcapil.kotabogor.go.id

PRIMA ANTRI

by Disdukcapil Kota Bogor

disdukcapilkotabogor

#RencanakanKedatanganAnda.

Kawan Dukcapil, untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, mulai 2 Mei 2024 diberlakukan booking antrian online melalui Prima Antri untuk pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Bogor. Masyarakat yang akan mengurus dokumen dapat menentukan sendiri tanggal kedatangan di Kantor Dukcapil kemudian sistem akan mengarahkan estimasi waktu kedatangannya. Dengan diterapkannya Prima Antri ini, diharapkan tidak ada lagi antrian panjang di pagi hari untuk mendapat nomor antrian awal. Yuk sama sama kita tertibkan antrian untuk pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.

@heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445

@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44

@dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari

#banggamelayanibangsa #rencanakankedatangananda

#primaantri

Lihat semua komentar

24 April 2024

16. Dukcapil Talk

disdukcapilkotabogor dan 2 lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DUKCAPIL

talk

disdukcapilkotabogor

DUKCAPIL TALK #2 : PPDB TAHUN 2024.

Bagaimana persiapan dan peran Dukcapil dalam PPDB Tahun 2024? Apa yang membedakan dengan PPDB Tahun sebelumnya? Dan apa harapan pelaksanaan PPDB ini? Semua diulang secara singkat dan jelas oleh Kadisdukcapil Kota Bogor dalam Dukcapil Talk edisi kali ini.

@rifi.10_

@heryagisantasari @sofiahsyarifah @gandjar_445

@pemkotbogor @berlihamdani @indrichandra44

@dukcapiljabar @teguh_setyabudi @dukcapilkemendagri

#disdukcapilkotabogor #dukcapilbisa #bogorberlari

#banggamelayanibangsa #dukcapiltalk #ppdb2024 #ppdb

#adminduk #kk #ktp

Lihat semua komentar

4 Juni 2024